

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN DANA
BAGI HASIL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA DI KABUPATEN / KOTA JAWA TIMUR TAHUN
2015-2017**

ARTIKEL ILMIAH

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi**



Oleh:

RAUDYA AHYIINI PRABAFITRI

2015310476

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Raudya Ahyiini Prabafitri
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 19 Januari 1997
N.I.M : 2015310475
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Keuangan
J u d u l : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Melalui Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2015-2017

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing

Tanggal :



Dr. Drs. Agus Samekto, Ak., M. Si

NIDN : 0716086302

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal :



Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA

THE EFFECT OF ORIGINAL INCOME, LOCAL SHOPPING, AND FUNDS FOR RESULTS AGAINST COMMUNITY WELFARE THROUGH HUMAN DEVELOPMENT INDEX IN KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TIMUR, 2015-2017

Raudya Ahyiini Prabafitri
STIE Perbanas Surabaya
Email: raudya155@gmail.com
Wonorejo Utara No. 16 Rungkut Surabaya

ABSTRACT

This study aims to obtain information and empirical evidence of the influence of local revenue, regional spending, and revenue-sharing funds on community welfare. The population in this study were all districts / cities in the province of East Java in 2015 to 2017. The samples taken in this study were 38 districts / cities to be used as research samples. The sampling technique used was purposive sampling. The method used in this study is a quantitative method with the analysis of WarpPLs version 6.0. The test results show that the original regional income affects the welfare of the community, regional spending does not affect the welfare of the community. However, funding for a negative effect on people's welfare.

Keywords: *the influence of local government performance on the welfare of society through the human development index in the district / city in East Java Province*

PENDAHULUAN

Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006). EKPPD merupakan penilaian kinerja berdasarkan LPPD (Laporan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), informasi keuangan daerah dan laporan-laporan lainnya yang dibuat

oleh pemerintah sebagai pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan (Permendagri Nomor 73 Tahun 2009).

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk di realisasikan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita cita dari setiap negara. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat dapat terepenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Hal lain, yang juga masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. UNDP (United Nations Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of enlarging people's choices). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Konsep pembangunan manusia, seharusnya dianalisis serta dipahami dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.

RERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (Agency Theory) Teori agensi merupakan suatu hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent* (Anthony dan Govindarajan, 2015). Prinsipal dalam hal ini yaitu pemilik sumber daya ekonomis, sedangkan agen yaitu pengelola dari sumber daya ekonomis tersebut. Didalam pemerintahan teori ini dapat diterapkan dalam hal hubungan keagenan antara eksekutif dan legislaif, dimana eksekutif berperan sebagai agen sedangkan legislatif berperan sebagai prinsipal. Dalam teori agensi penerapan pemerintahan, legislatif selaku prinsipal memberikan tugas kepada eksekutif selaku agen dalam hal pelimpahan wewenang penyusunan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Rancangan APBD yang dikenal dengan sifat desentralisasi untuk perwujudan desentralisasi fiskal. Rancangan APBD ini digunakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga masing – masing daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola sumber daya alam.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita cita dari setiap

negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat dapat terepenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Hal lain, yang juga masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan. Kesejahteraan Masyarakat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari upaya peningkatan kemampuan modal dasar manusia. Pembangunan manusia merupakan komponen pembangunan melalui pemberdayaan penduduk yang menitik beratkan pada peningkatan dasar manusia pembangunan yang dihitung menggunakan ukuran besar kecilnya angka pendidikan, kesehatan dan daya beli, dan pendidikan. Semakin tinggi angka yang diperoleh maka semakin tercapai tujuan dari indeks pembangunan manusia. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari seberapa besar permasalahan yang ada berupa kemiskinan, pengangguran, pendidikan yang tidak menyeluruh dan masalah keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6, sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Belanja Daerah

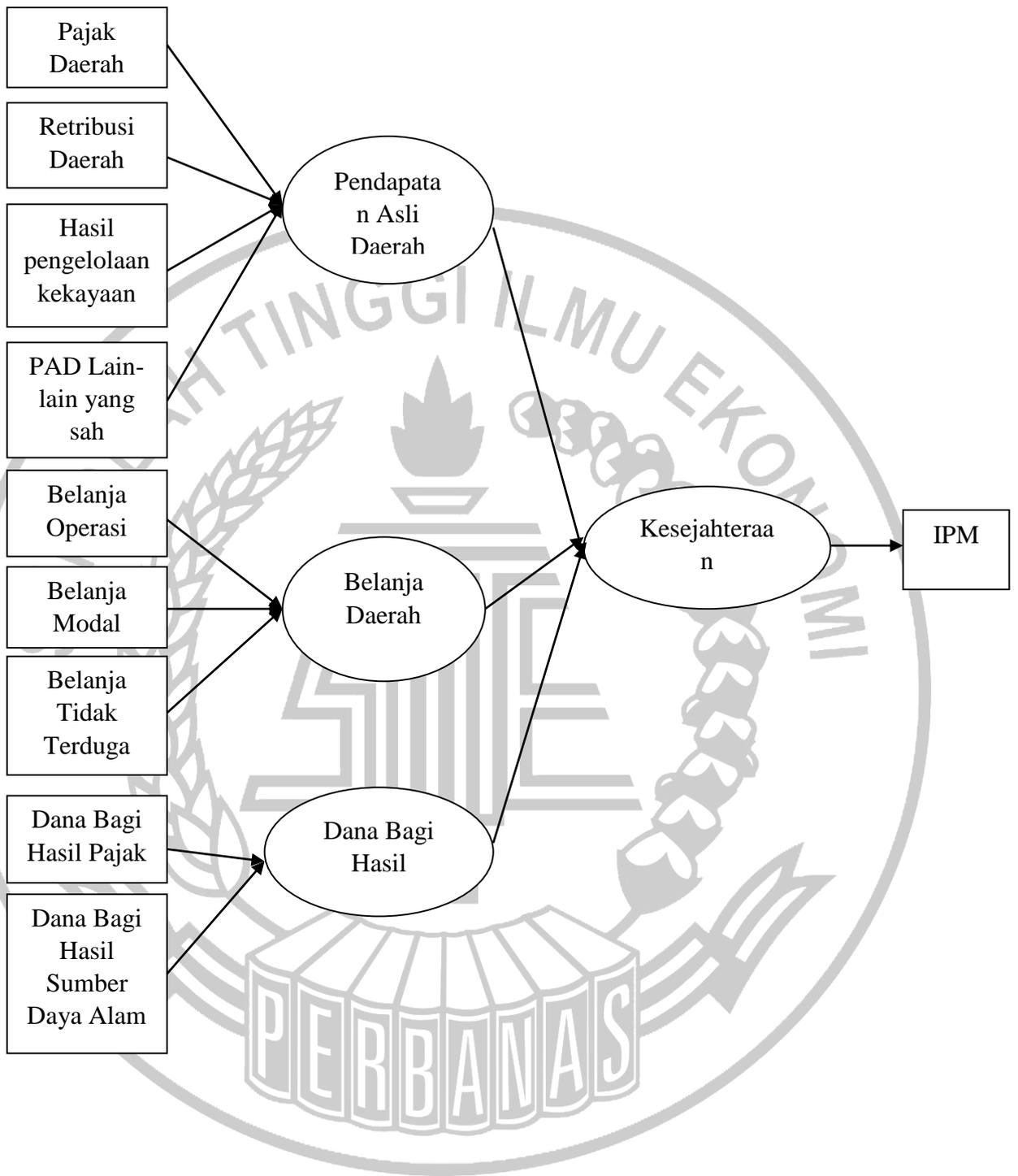
Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14). Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah terbagi menjadi 3 kelompok yaitu belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai (honorarium atau upah), belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan untuk belanja modal terdiri dari belanja pegawai (selain honorarium atau upah), belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal aset tetap, serta yang terakhir yaitu belanja tidak terduga (Nordiawan *et al*, 2014).

Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam). Bagi Hasil Pajak terdiri atas PBB, BPHTB, PPH Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Sedangkan Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam yang berasal kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Sifat dari DBH ini hampir sama dengan DAU yang bersifat *block grant*. Secara teoritis pemerintah daerah akan mampu menetapkan belanja modal yang semakin besar jika anggaran DBH semakin besar pula, begitupun sebaliknya semakin kecil belanja modal yang akan ditetapkan jika anggaran DBH semakin kecil.

Rerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

H₂: Belanja Daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

H₃: Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini merupakan penelitian deduktif yaitu tipe penelitian yang bertujuan menguji hipotesis validasi teori atau pengujian aplikasi teori pada keadaan tertentu. Berdasarkan karakteristik masalah penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat.

Berdasarkan jenis datanya, penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam penelitian arsip karena penelitian ini pengujian terhadap fakta tertulis (dokumen) atau berupa arsip data. Data penelitian merupakan data skunder. Dimana data skunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Nur dan Bambang, 1999:12).

Identifikasi Variabel

Variabel yang akan diamati dalam penelitian ini adalah variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi

oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah variabel dependen yang akan diteliti dalam penelitian ini:

Y : Kesejahteraan Masyarakat Melalui Indeks Pembangunan Manusia Variabel independen yang akan diteliti adalah:

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Belanja Daerah

X₃ : Dana Bagi Hasil

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Berikut adalah definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian.

Variabel dependen:

1. Kesejahteraan Masyarakat merupakan Variabel dependen dalam penelitian ini yang diteliti melalui Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah Pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun rumus yang digunakan untuk mengetahui Indeks Pembangunan Manusia ialah:

$$IPM: \sqrt{\text{Kesehatan} \times \text{Pendidikan} \times \text{Pengeluaran}} \times 100$$

Variabel Independen:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) yaitu sumber dana dari pemerintah untuk membiayai daerah itu sendiri yang bertujuan untuk keperluan dan kepentingan daerah tersebut. PAD sendiri didapat dari hasil pajak daerah,

hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan dari daerah tersebut yang sifatnya untuk mengembangkan dan meniggikan pendapatan daerah melalui alokasi belanja modal. Rumus untuk menghitung besarnya Pendapatan Asli Daerah ialah:

PAD : Pajak Daerah +
Retribusi Daerah +
Hasil Pengelolaan
Kekayaan yang
Dipisahkan + Lain-
lain PAD yang sah

2. Belanja Daerah
Belanja daerah merupakan suatu pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak terduga. Sebagai tanggung jawab pemerintah untuk menjalankan pengelolaan belanja daerah, pemerintah perlu menerapkan dan memperhatikan konsep manajemen belanja daerah. Rumus untuk menghitung belanja daerah yaitu:

Belanja
Daerah : belanja operasi +
belanja modal +
belanja tak terduga

3. Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus untuk menghitung Pertumbuhan Ekonomi:

Perubahan
DBH : Dana Bagi Hasil
Pajak + Dana Bagi
Hasil Sumber Daya
Alam

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi penelitian ini adalah dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015 hingga 2017. Sampel penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Timur khususnya yang mengenai Realisasi APBD di pada tahun 2014-2017. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan *Purposive Sampling*. Pengertian *Purposive Sampling* yaitu metode *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan memilih sampel berdasarkan kriteria yang sesuai dengan data yang dibutuhkan peneliti.

Data dan metode pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Indriantoro dan Supomo, 2012:147). Data yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik, data tersebut berupa Laporan Angka Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2015-2017. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi yang dilakukan mengumpulkan data sekunder, data di dapat dari Badan Pusat Statistik.

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu model penelitian *Warp Partial Least Square* (PLS), yaitu metode analisis yang *powerfull* karena tidak menuntut banyak permintaan seperti skala pengukuran tertentu, jumlah sampel yang besar atau data harus memenuhi asumsi distribusi tertentu (Latan & Ghozali, 2013:03).

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk menjabarkan deskripsi data dari seluruh variabel yang

akan dimasukkan pada model penelitian yang dapat dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dimaksudkan untuk dapat menjelaskan alur mengenai distribusi dan perilaku data sampel (Ghozali, 2011).

Uji Deskriptif (*Outer Model*)

Menurut Latan dan Ghozali (2013:13), menyatakan bahwa model pengukuran atau *outer model* dilakukan untuk mengetahui dan menilai validitas dan reliabilitas suatu konstruk. Analisis konfirmatori atau sering disebut dengan *confirmatory faktor analysis* (CFA) digunakan untuk menguji dimensionalitas suatu konstruks. Dalam model pengukuran atau *outer model* dengan menggunakan indikator reflektif dievaluasi menggunakan *convergent* dan *discriminant validity* dari indikatornya dan *composite reliability* untuk *block indikator*. Sedangkan, *outer model* dengan formatif indikator dievaluasi berdasarkan pada *substantive content* ya yaitu dengan

membandingkan besarnya *relative weight* dan melihat signifikansi dari ukuran *weight* tersebut (Imam Ghozali, 2006:24).

Model Struktural (*Inner Model*)

Metode *structural* atau *inner model* memiliki tujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten yang dihipotesiskan. *structural*. (Latan dan Ghozali, 2013: 80). Penilaian model *structural* dengan melihat nilai *R-square* didapatkan bahwa nilai *R-square* 0.75 menunjukkan bahwa model kuat, nilai 0.50 menunjukkan model moderate, dan nilai 0.25 menunjukkan bahwa model lemah. Hasil dari PLS *R-square* menunjukkan bahwa jumlah varian dari konstruk yang dijelaskan oleh model. (Latan dan Ghozali, 2013:81-83). Nilai *Q-square* lebih besar 0 (nol) menunjukkan bahwa model mempunyai nilai *predictive relevance*, sedangkan nilai *Q-square* kurang dari 0 (nol) menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Pajak Daerah	15,139,402,821	3,595,670,492,734	202074566765	506943721647
Retribusi Daerah	4,899,198,825	557,966,574,670	42866464375	84702614398
Hasil Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan	783,805,224	462,534,767,564	14727611490	47428467997
Lain-Lain PAD yang sah	12,768,085,207	2,330,344,771,376	228288474992	275376408938
Belanja Operasi	324,169,328,852	6,537,650,478,862	1512165560136	925910123419
Belanja Modal	46,602,302,143	2,517,891,658,246	474810775688	358687922885
Belanja Tidak Terduga	-	2,794,454,037,722	32570703779	271009133108
Dana Bagi Hasil Pajak	13,596,894,547	393,908,771,611	70902183492	64356925574
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	-	775,343,282,683	42601168284	107931555849
IPM	58.18	81.07	69.82	5.39

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	58.18	80.05	68.90605263	5.283787309
2016	59.09	80.46	70.00447368	5.484603855
2017	59.90	81.07	70.56368421	512.9440019

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF VARIABEL PAJAK DAERAH

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	15139402821	2738899424558	172433042886	443076175415
2016	16592698916	3000152384487	204100970958	486919005947
2017	4899198825	3595670492734	229689686452	587351840818

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF RETRIBUSI DAERAH

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	5209867148	537319752463	41742110144	86581634872
2016	5855560775	413032217756	46664238637	81486144307
2017	4899198825	557966574670	31572327470	88043105644

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DIPISAHKAN

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	783,805,224	135,324,221,731	10,773,734,597	21,893,373,585
2016	1,023,333,373	131,847,096,407	10,457,489,278	21,219,989,595
2017	1,038,286,209	462,534,767,564	22,951,610,595	76,394,494,889

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	13,153,588,510	2,330,344,771,376	220,298,625,617	369,201,871,860
2016	12,768,085,207	1,663,910,799,218	208,364,171,081	259,552,189,974
2017	28,308,956,257	873,538,562,156	245,402,894,408	157,654,435,330

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF BELANJA OPERASI

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	324,169,328,852	4,705,234,504,032	1,415,023,405,125	761,302,568,331
2016	612,346,333,855	6,537,650,478,862	1,663,076,804,858	1,135,138,097,810
2017	395,842,837,980	5,394,517,494,011	1,458,396,470,426	845,043,790,511

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF BELANJA MODAL

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	74,291,701,183	1,785,125,255,500	459,382,462,719	323,480,319,500
2016	147,705,780,026	1,789,394,044,827	483,916,180,367	298,155,461,467
2017	46,602,302,143	2,517,891,658,246	481,133,683,979	446,115,053,089

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF BELANJA TIDAK TERDUGA

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	0	11,380,331,569	1,132,156,868	2,297,322,434
2016	0	2,794,454,037,722	74,822,056,594	453,111,218,932
2017	0	781,464,040,500	22,345,949,167	128,280,409,057

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF DANA BAGI HASIL PAJAK

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	13,596,894,547	228,584,521,012	62,288,197,958	52,471,457,901
2016	26,556,818,004	393,908,771,611	80,608,603,524	74,689,243,397
2017	25,588,171,757	244,686,816,268	61,998,242,014	43,305,103,328

Sumber: Data primer, diolah (2019)

ANALISIS DESKRIPTIF DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2015	0	775,343,282,683	49,468,618,017	123,408,079,250
2016	0	664,065,036,283	40,910,004,231	104,745,645,622
2017	0	623,083,786,839	38,096,521,689	98,526,190,257

Sumber: Data primer, diolah (2019)

Model Pengukuran (*Outer Model*)

1. *Convergent Validity*

NILAI *LOADING FACTOR* KONSTRUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

No	Indikator	Nilai <i>Loading Factor</i>	<i>P-Value</i>	Keterangan
1	IPM	1,000	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil *WarpPLS* 6.0 yang telah diolah, Lampiran

NILAI LOADING FACTOR KONSTRUK PENDAPATAN ASLI DAERAH

No	Indikator	Nilai Loading Factor	P-Value	Keterangan
1	PD	0,936	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
2	RD	0,907	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
3	HP	0,624	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
4	PS	0,494	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil *WarpPLS* 6.0 yang telah diolah, Lampiran

NILAI LOADING FACTOR KONSTRUK BELANJA DAERAH

No	Indikator	Nilai Loading Factor	P-Value	Keterangan
1	BO	0,882	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
2	BM	0,879	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
3	BTT	0,169	0,032	Tidak Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil *WarpPLS* 6.0 yang telah diolah, Lampiran

NILAI LOADING FACTOR KONSTRUK DANA BAGI HASIL

No	Indikator	Nilai Loading Factor	P-Value	Keterangan
1	DBHP	0,810	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>
2	DBHSDA	0,810	< 0,001	Memenuhi <i>Convergent Validity</i>

Sumber: Hasil *WarpPLS* 6.0 yang telah diolah, Lampiran

2. Discriminant Validity

NILAI LOADING FACTOR ANTAR KONSTRUK

	PAD	BD	DP	KM
PD	0,936	0,255	0,020	0,152
RD	0,907	0,054	0,040	0,107
HP	0,624	-0,659	-0,008	-0,149
PS	0,494	0,249	-0,101	-0,296
BO	-0,112	0,882	-0,035	0,056
BM	0,324	0,879	0,073	-0,111
BTT	-1,106	0,168	-0,203	0,289
DBHP	-0,210	-0,255	0,810	-0,044
DBHS	0,210	0,255	0,810	0,044
IPM	-0,000	0,000	-0,000	1,000

3. Reliability Validity

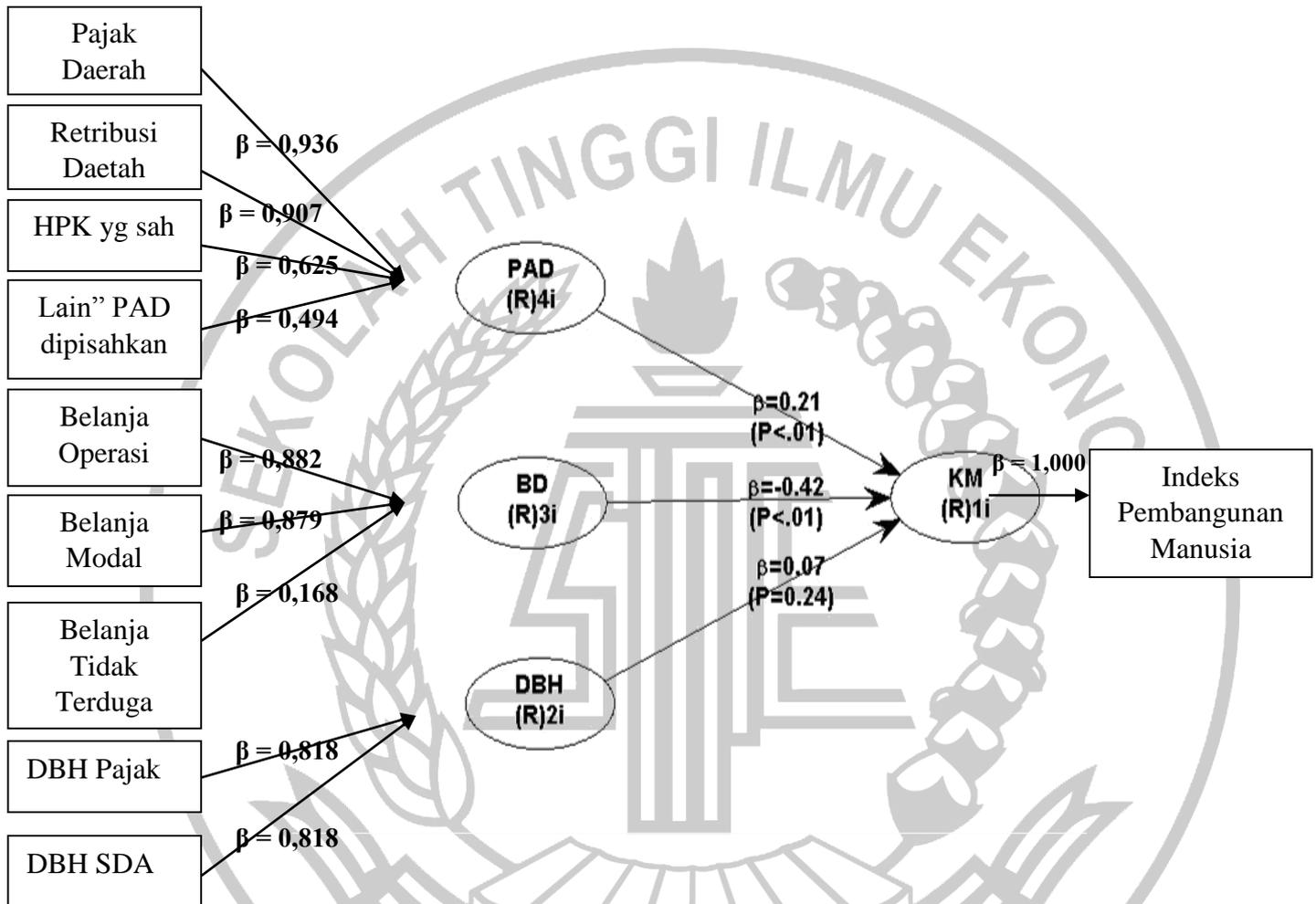
Pengujian selanjutnya adalah uji reabilitas konstruk yang dapat diukur melalui *composite reliability*. Hasil dari

WarpPLS 6.0 menunjukkan bahwa nilai konstruk kesejahteraan masyarakat adalah 1,000, konstruk pendapatan asli daerah sebesar 0,840, nilai untuk konstruk belanja

daerah adalah 0,724, dan nilai konstruk dana bagi hasil 0,729. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai *composite reliability* dari konstruk angka yang

dihasilkan lebih dari 0,7. Berdasarkan kriteria *Reliability*, hasil tersebut menunjukkan bahwa *Reliability Validity* dikatakan baik.

Model Struktural (*Inner Model*)



P-values

Variabel	Kesejahteraan Masyarakat
Pendapatan Asli Daerah	0,009
Belanja Daerah	<0,001
Dana Bagi Hasil	0,239

Sumber: Hasil *WrapPLS*, Lampiran

Path Coefficients

Variabel	Kesejahteraan Masyarakat
Pendapatan Asli Daerah	0,212
Belanja Daerah	-0,422
Dana Bagi Hasil	0,066

Sumber: *WrapPls*, Lampiran

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dengan empat indikator yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia periode 2015 hingga 2017. Disimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ditentukan dari besar atau tidaknya pendapatan asli daerah serta campur tangan pemerintah pusat.

Pengaruh Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Hasil pengujian belanja daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, ini disebabkan karena belanja daerah tidak mampu mengatasi otonomi daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia didaerahnya dan juga adanya campur tangan pemerintah pusat. Belanja daerah yang diberikan pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yaitu memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, meningkatkan pelayanan publik dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan dana bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia. Dana bagi hasil tersebut merupakan dana perimbangan yang bersifat *block grants*. *Block grants* lebih mengacu pada hibah dalam jumlah tertentu dari pemerintah pusat kepada masing-masing daerah untuk membantu mendukung berbagai program pemerintah

daerah. Komponen Dana Bagi Hasil antara lain Kehutanan berasal dari Dana Reboisasi digunakan untuk RHL (Rehabilitasi hutan dan lahan), DBH Migas digunakan untuk tambahan anggaran pendidikan dasar dan DBH Cukai digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Porsi yang tidak terlalu besar dan adanya earmarking dari ketiga komponen Dana Bagi Hasil membuat total Dana Bagi Hasil yang dapat digunakan secara fleksibel melalui output belanja modal membuat variabel Dana Bagi Hasil menjadi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia. Sejalan dengan pembahasan tersebut, berdasarkan hasil estimasi variabel Dana Bagi Hasil merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling kecil terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian analisis statistik dan uji hipotesis, maka penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Belanja Daerah memiliki pengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.
3. Dana Bagi Hasil tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui indeks pembangunan manusia di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak terlepas dari adanya keterbatasan penelitian, keterbatasan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan populasi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Periode penelitian hanya tiga tahun yaitu dari tahun 2015-2017, dikarenakan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2018 belum seluruhnya dipublikasikan pada situs Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Daerah.
3. Penelitian ini hanya menggunakan sebagian kecil komponen APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Dana Bagi Hasil.
4. Study ini tidak menganalisis lebih jauh tentang efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Misalnya tidak mempertimbangkan jumlah, struktur usia dan tingkat pendidikan pegawai dan penduduk.

Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan yang diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran untuk peneliti mendatang, antara lain:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan populasi dari Provinsi seluruh Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen diluar variabel independen penelitian ini seperti pertumbuhan ekonomi bias untuk dijadikan tambahan variabel.

DAFTAR PUSTAKA

Denni Sulistio Mirza. (2012). Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Edaj*, 1(1).

<https://doi.org/10.15294/EDAJ.VII.2.474>

Hadi, S. (2012). PENGARUH BELANJA PEMERINTAH DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Media Ekonomi Dan Manajemen*, 25(1), 1-12.

Usnida, U. (2010). Pendapatan, Pengaruh Daerah, Asli Umum, Dana Alokasi Alokasi, Dana Terhadap, Khusus Manusia, Pembangunan Di, Ipm Sinjai, Kabupaten.

Dewi, P. A. K., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1), 32-40.

Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad Fajar Suryo Agung. (2015). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening*. 190-203.

Retnasari, E. D. (n.d.). Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur.

Williantara, G. F., & Budiasih, I. G. A. N. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2044-2070.

Sarkoro, H., & Zulfikar. (2016). Pembangunan Manusia (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014) Pendahuluan Kajian Pustaka Hipotesis dan Pengembangan. *Riset*

- Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2010), 54–63.
- Ida Ayu Candra Yunita, & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(3), 2409–2438.
- Fretes, P. N. De. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Kepulauan Yapen. 2(2), 2005–2025.
- Winarti, Astri. 2014. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah Bidang Kesehatan, Kemiskinan dan PDB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012. Skripsi:Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang.
- Todaro, P Michael. 2011. Pembangunan Ekonomi jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Sukirno, Sadono. 2012. Teori Pengantar Makroekonomi Edisi Ketiga. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Subandi, MM. 2014. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta.
- Bilal, Wahid A. 2012. Analisis Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pertumbuhan Ekonomi di Makassar periode 1996-2011. Skripsi: Jurusan Ekonomi Pembangunan,Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Jogiyanto, H. *Metode Penelitian Bisnis* (6th Edition ed.). Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMgho SPSS 21* (7th Edition ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20180416/9/784824/ini-penjelasan-bps-soal-peningkatan-indeks-pembangunan-manusia-indonesia-2017>
 (diakses 13 Mei 2019)
- <https://faktualnews.co/2019/05/06/tingkat-pengangguran-terbuka-di-jawa-timur-capai-383-persen-atau-826-ribu-orang/138851/>
 (diakses 13 Mei 2019)
- <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pr2p1i335/pengangguran-jatim-masih-didominasi-lulusan-smk> (diakses 13 Mei 2019)
- <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20160404084700-78-121442/dana-bagi-hasil-cukai-tembakau-jatim-berkurang-tahun-ini#>